

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹¹

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹²

¹⁰ Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

¹¹ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988). 8

¹² Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009) .6

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

2. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

¹³ Drs. M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) . 15-17

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁴ perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang¹⁵.

1. Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu what, way, where, when, who dan how. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?

¹⁴ *Prinsip-prinsip manajemen*. 46

¹⁵ *dasar-dasar Manajemen*. opcid. 11

- Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
- Kapanakah tindakan itu dilaksanakan ?
- Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?¹⁶

2. Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

- Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

¹⁶Dasar-dasar manajemen opcid. 48-49

3. Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- Menetapkan tugas dan tujuan
- Mengobservasi dan menganalisa
- Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- Membuat sintesa
- Menyusun rencana¹⁷

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dasar- dasar pengorganisasian

Dasar-dasar Yang fundamental dari pengorganisasian adalah :

- Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan

¹⁷Dasar-dasar manajemen, Ibid. 52-53

- Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung.
- Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.¹⁸

2. Prinsip-prinsip Organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut.

- Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakuakn satu atau lebih kegiatan.
- Pembagian kerja

Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam suatu organisas. Dengan pembagian kerja, ditetapkan

¹⁸ Susilo Martoyo, SE, *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*, (yogyakarta : BPFE, 1998).

sekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi.

- Delegasi kekuasaan (*delegation of Authority*)

Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

- Rentangan kekuasaan

yaitu beberapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.

- Tingkat-tingkat pengawasan

- Kesatuan perintah dan tanggung jawab (*Unity of Command and responsibility*)

- Koordinasi untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi sebagai keseluruhan.¹⁹

3. Bentuk-bentuk organisasi

- Bentuk organisasi garis

¹⁹ *Dasar-dasar manajemen, Opcid. 71-78.*

Organisasi ini merupakan organisasi tertua dan paling sederhana, dan merupakan organisasi kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi.

- Bentuk organisasi fungsional

Organisasi ini diketuai oleh pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut.

- Bentuk organisasi garis dan staf

Bentuk dari organisasi ini dianut oleh organisasi yang besar, daerahnya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam

- Bentuk organisasi staf dan fungsional

Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi staf.

c. Pengerakan (*Actuating*)

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian.

Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut” gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.²⁰

Dalam proses *actuating* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

1. Tujuan pemberian perintah

Pemberian perintah dari atasan kepada bawahannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkordinasi kepada suatu arah selanjutnya dengan memeberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahannya itu sendiri.

2. Unsur perintah

- Intruksi resmi
- Dari atasan kebawahan
- Mengerjakan atau
- Merealisasikan tujuan organisasi

²⁰ *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*. 116.

3. Jenis-jenis perintah

Jenis perintah dibagi dua yaitu :

a. Perintah lisan diberikan apabila :

- Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana
- Dalam keadaan darurat
- Bawahann yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah
- Perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat
- Apabila dalam mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar.

Sedangkan kelemahan dari perintah ini adalah tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, dan juga perintah ini terlalu fleksibel.

b. Perintah tertulis dapat diberikan apabila :

- Pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angka-angka yang pasti dan teliti
- Bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain
- Bila pegawai yang diperintah sering lupa

- Jika tugas yang diperintah itu berangsur dari satu bagian ke bagian yang lain
- Jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahan maka akan menimbulkan akibat yang besar.

4. Prinsip-prinsip perintah

- Perintah harus jelas
- Perintah diberi satu-persatu
- Perintah harus positif
- Perintah harus diberikan kepada orang yang positif
- Perintah harus erat dengan motifasi
- Perintah satu aspek berkomunikasi²¹

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Henry Fayol)²²

1. Prinsip-prinsip pengawasan

²¹ *pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*. 120-123

²² Sofyan Syafri, *manajemen kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996). 282

- Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- Fleksibel
- Dapat mereflektif pola organisasi
- Ekonomis
- Dapat dimengerti.
- Dapat menjamin diadakanya tindakan korektif.

2. Cara-cara mengawasi

- Peninjau pribadi
- Pengawasan melalui laporan
- Pengawasan melalui laporan tertulis.
- Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.²³

3. Langkah-langkah pengawasan

- Penetapan standar dan metode penilain kinerja

²³ *Dasar-dasar manajemen*, lbid. 178-179

- Penilaian kinerja
- Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak.
- Pengambilan tindakan koreksi²⁴

3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Dari sekian banyak prinsip manajemen yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh seorang calon manajer, diantaranya yang terpenting adalah :

1. Prinsip pembagian kerja

Tujuan dari pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang terbaik, pembagian kerja sendiri dapat membantu pemutusan tujuan, dan disamping itu juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu dan kelompok orang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

2. Prinsip wewenang dan tanggung jawab

Untuk melengkapi sebuah organisasi, unit-unit pegawai digabungkan melalui suatu wewenang, sedangkan fungsi dari wewenang tersebut yakni : tanggung jawab yang menjadi kewajiban setiap individu

²⁴ *Pengantar manajemen*. 321

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan terbaik dari kemampuan yang dimilikinya.

Setiap manajer harus memiliki keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang. Wewenang harus didelegasikan atau dibagi oleh seorang manajer pada pihak-pihak lain untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban khusus. Pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi kewajibannya. Namun wewenang akhir tetap berada pada manajer yang memegang wewenang untuk mengelola seluruh kegiatan dan memikul tanggung jawab terakhir.²⁵

3. Prinsip Tata Tertib dan Disiplin

Dalam suatu organisasi pastilah terdapat tata tertib yang berlaku di dalam organisasi tersebut baik yang tertulis, melalui lisan, peraturan-peraturan dan kebiasaan yang telah lama membudaya di lingkungan tersebut. Dan setiap orang yang ada didalam organisasi tersebut harus bisa bersikap disiplin dalam menta'ati tata tertib yang ada, karena Sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan tertib dan disiplin akan dapat meningkatkan kualitas kerja. Dan dengan meningkatnya kualitas kerja akan pula menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha.

4. Prinsip kesatuan komando

²⁵ *Prinsip-prinsip manajemen.* 100-101.

Satu komando artinya satu tujuan yang satu terhadap satu orang pimpinan saja, tidak mungkin dalam suatu organisasi terdapat dua manajer sekaligus, karena setiap tindakan para petugas hanya menerima perintah dari satu atasan saja, bila tidak, wewenang akan dikurangi, disiplin terancam, ketertiban terganggu dan akan mengalami ujian. maka dari itu perintah hanya datang dari satu sumber saja jadi setiap orang juga akan tahu pada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

5. Prinsip Semangat Kesatuan

Bersatu kita teguh bercerai kita berai, peribahasa itulah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari begitu gambaran dari prinsip semangat kesatuan yang ada di setiap organisasi, karena semangat kesatuan ini harus selalu dipahami oleh suatu kelompok yang akan melakukan usaha bersama. Setiap orang harus memiliki rasa senasib sepenanggungan, berjiwa kesatuan, dari yang paling atas hingga paling bawah sehingga setiap orang akan bekerja dengan senang dan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha.

6. Prinsip Keadilan dan Kejujuran

Dalam suatu manajemen seorang manajer harus bisa bersikap adil kepada bawahannya, sehingga setiap orang bisa bekerja dengan sungguh-sungguh dan setia, keadilan disini yaitu misalnya berupa penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan pendidikan atau pada bidangnya, serta pembagian upah yang didasarkan oleh berat-ringan pekerjaan dan tanggung jawab seseorang bawahan. Sedangkan kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semua itu bersama-sama menghasilkan hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan. Dan dalam permasalahan dalam karya tulis ini manajemen sangat diperlukan guna untuk mencapai tujuan penting untuk memberantas buta aksara dengan pengelolaan program keaksaraan fungsional di Dusun Petissari-Babaksari Dukun Gresik.

B. Tinjauan Tentang Program Keaksaraan Fungsional

1. Pengertian Tentang Program Keaksaraan Fungsional

Program keaksaraan fungsional merupakan bentuk pelayanan Pendidikan Luar Sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara, agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan menganalisis, yang

berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya.²⁶

Selain itu keaksaraan fungsional dari buku pedoman lain mengartikan yaitu pendidikan yang diselenggarakan bagi warga masyarakat penyandang buta aksara untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan keaksaraan (membaca, menulis, berhitung) serta ketrampilan fungsional yang dibutuhkan terkait dengan kemampuan keaksaraan itu, sehingga dengan kemampuan keaksaraan itu mereka dapat menguasai pendidikan dasar (basic education) yang dibutuhkan dalam habitat dan komunitas hidupnya²⁷

Filosofi keaksaraan fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Bynham (1995 : 1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya keaksaraan termasuk ideologi. Dengan berupa ideologi tentu saja keaksaraan tidak bersifat netral, semuanya tergantung pada keputusan sebagai sesuatu yang tidak netral maka program keaksaraan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keaksaraan tersebut.

UNESCO mendefinisikan kemampuan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan seseorang dikatakan mempunyai kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang tersebut dapat

²⁶Departemen pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan luar sekolah, *konsep dasar penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dan materi pembevelan tutor*.2012. 1

²⁷Departemen pendidikan nasional direktorat jendral pendidikan luar sekolah, *kurikulum berbasis kompetensi pendidikan keaksaraan*, 2004. 1

terlibat dalam aktivitas dimana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai efektif function kelompok dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri²⁸

Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik disimpulkan bahwa keaksaraan fungsional suatu program yang diselenggarakan oleh diknas pendidikan luar sekolah untuk masyarakat buta aksara agar bisa membaca, menulis dan berhitung serta kemampuan fungsional yang berhubungan dengan kehidupan kesehariannya yang diperoleh atau terkait dengan keaksaraan itu sendiri.

2. Tujuan dan fungsi Program Keaksaraan Fungsional

a. Tujuan

Melalui program ini, diharapkan para peserta didik dapat :

- Meningkatkan pengetahuan membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan fungsional untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik.
- Menggali potensi dan sumber-sumber kehidupan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik, untuk memecahkan masalah keaksaraannya.²⁹
- Menciptakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

²⁸ *Jurnal Cakrawala Kependidikan, Vol.6.No.20 september, 2008 : 112*

²⁹ *Diknas pendidikan non formal, Konsep dasar penyelenggaraan keaksaraan fungsional dan materi pembevelan tutor.2012*

- Dengan kemampuan *calistung* merupakan dasar untuk terciptanya masyarakat yang gemar belajar dan mampu menekan angka *drop out* di pendidikan persekolahan.
- Meningkatnya angka melek aksara penduduk secara nasional sehingga menyumbang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia.³⁰

b. Fungsi

Standar kompetensi pendidikan keaksaraan di susun untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung (*calistung*) peserta didik agar :

- Mampu menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi.
- Mampu memanfaatkan kemampuan dan ketrampilan keaksaraanya dalam kehidupan sehari-hari
- Dapat memotivasi dan memeberdayakan dirinya.
- Mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya (*better life*).
- Mampu menjadi masyarakat yang gemar belajar.³¹

³⁰ *petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan penyelenggaraan keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, dan taman baca masyarakat rintisan, 8*

3. Aspek Komponen Program Keaksaraan Fungsional.

a. Warga belajar

- Buta huruf murni
- Putus SD kelas 1, 2, 3
- Priorita usia 10- 40 thn
- Pengganguan dan masyarakat yang berpenghasilan rendah

b. Tutor

- Berpendidikan minimal SUP
- Tenaga sukarela
- Diutamakan dari daerah setempat
- Minimal 1 tutor untuk per kelompok pelajaran.
- Ada pelatihan tutor dan master di setiap provinsi

c. Pihak pengelola

- Berpendidikan minimal SLTP
- Mampu mengelola kelompok belajar
- Mampu melaksanakan administrasi
- Berkedudukan di daerah setempat
- Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.

4. Dasar Pelaksanaan Program Keaksaraan Fungsional.

³¹ kurikulum berbasis kompetensi pendidikan keaksaraan, Opcid, 2

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propensi sebagai daerah otonom.
- d. Peraturan Pemerintah No. 22 1999 tentang Pemerintah Daerah
- e. Renstra Provinsi jawa timur.³²
- f. Garis-garis Besar Haluan Negara. (GBHN)
- g. Batang tubuh UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2³³

5. Konsep Program Keaksaraan Fungsional

UNESCO (1996) meringkas dan menjelaskan beberapa konsep program Keaksaraan Fungsional yang dibagi menjadi beberapa elemen-elemen sebagai berikut³⁴ :

- a. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya tergabung dalam perencanaan ekonomi dan sosial
- b. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya dimulai dari penduduk yang memiliki motivasi tinggi dan yang bermanfaat bagi pengembangan daerah mereka.

³² Dinas Pendidikan dan kebudayaan Profinsi Jawa Timur sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, *petunjuk pelaksanaan program pemberantasan buta aksara dengan Metode Pendekatan Keaksaraan Fungsional*, (Jawa Timur : 2003), 2-3

³³ Soelaiman joesoef, *konsep dasar pendidikan luar sekolah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992)hlm.48.

³⁴ Tatang Somantri, *Melek Aksara untuk tingkat Dasar*, (Bandung, PT Indahaya Adipratama, 2007). 7-8

- c. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya dikaitkan dengan prioritas ekonomi dan menjadi prioritas pengembangan ekonomi.
- d. Program Keaksaraan Fungsional seharusnya mengajari pengetahuan professional dan tehnik sehingga menimbulkan partisipasi bagi warga belajar secara penuh dalam kehidupan ekonomi dan kewarganegaraan.
- e. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya merupakan bagian integral dari perencanaan pendidikan menyeluruh dan sistem pendidikan yang berlaku.
- f. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya dana berasal dari berbagai sumber pemerintah dan swasta, maupun dari investasi ekonomi.
- g. Program Keaksaraan Fungsional hendaknya membantu mencapai tujuan ekonomi seperti : meningkatkan produktivitas tenaga kerja, produksi bahan makanan, industrialisasi, mobilitas sosial dan professional, kriteria tenaga kerja baru, dan beragamnya aktifitas ekonomi³⁵

6. Prinsip-Prinsip Program Keaksaraan Fungsional

Ada empat pilar utama pembelajaran program keaksaraan yang dikembangkan berdasarkan paradigma pendidikan orang dewasa yang menggambarkan pembelajaran partisipatif, yaitu :

³⁵ Kusnadi M.pd dkk, *pendidikan keaksaraan filosofis, Strategi, Implementasi*,(Jakarta : Diknas Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2005). 164-165

- a. Konteks lokal : Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan minat, kebutuhan pengalaman dan budaya lokal serta potensi yang ada di sekitar peserta didik.
- b. Desain lokal : Tutor bersama peserta didik perlu merangsang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar sebagai jawaban atas hal – hal tersebut di atas.
- c. Partisipatif : Tutor perlu melibatkan peserta didik berpartisipasi secara aktif dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran.
- d. Pemanfaatkan Hasil Belajar : Dari hasil pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah keaksaraannya dan meningkatkan mutu serta taraf hidupnya.³⁶

Implikasi hal itu terhadap proses pembelajaran adalah bahwa tutor perlu memberikan dorongan dan membantu orang dewasa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, kemampuan fisik dan arah belajar yang diinginkan, dipilih dan ditetapkan oleh mereka sendiri.³⁷

7. Tahap-Tahap Dalam Program Keaksaraan Fungsional

Adapun tahap-tahapan pelaksanaan program keaksaraan fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Pemberantasan

³⁶ konsep dasar penyelenggaraan program keaksaraan fungsional dan materi pemebekalan.hlm 2

³⁷ Endang Sulistyani, *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Program pembelajaran Keaksaraan*, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 8 No. 3, Desember 2008. 133

Tahap pemberantasan adalah Tahap Keaksaraan dasar, dimana warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang menulis, membaca dan berhitung tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran warga belajar.

b. Tahap Pembinaan Kemampuan Fungsional

Tahap pembinaan Kemampuan Fungsional adalah tahap lanjutan, dimana warga belajar yang telah dapat membaca, menulis dengan lancar serta memiliki pengalaman, tetapi perlu meningkatkan kemampuan fungsional dalam kehidupannya sehari-hari.

c. Tahap pelestarian

Tahap pelestarian adalah tahap mandiri, warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan fungsional untuk dapat memecahkan masalah dan mencari informasi serta nara sumber sendiri. Warga belajar tahap ini boleh masuk KBU, keterampilan dan lain –lain agar mereka dapat mengembangkan kemampuan yang telah dimilikinya.

d. Sertifikat atau. Surat Tanda Serta Belajar (STSB)

adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada warga belajar yang telah mengikuti penilaian tahap akhir sesuai dengan tahap yang diikuti (Pemberantasan, Pembinaan dan Pestaarian) Warga belajar yang menyelesaikan tahap Keaksaraan dasar menerima STSB Pemberantasan Buta Huruf dan boleh melanjutkan program Keaksaraan Fungsional untuk mengembangkan kemampuan fungsional. Warga belajar yang menyelesaikan

Tahap pembinaan Kemampuan. Fungsional menerima STSB Pelestarian dan boleh masuk program lain seperti KBU, Kursus, Keterampilan dll.³⁸

C. Tinjauan Tentang Pemberantasan Buta Aksara

1. Jenis-Jenis Metode Pemberantasan Buta aksara

Banyak variasi metode yang dapat digunakan tutor dalam membelajarkan warga belajar. Ketepatan penggunaan beberapa metode dan teknik pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan dasar yang sudah dimiliki warga belajar serta minat dan kebutuhan warga belajar. Oleh karena itu, keanekaragaman metode dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, minat dan kebutuhan warga belajar. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memilih metode tertentu yaitu: (1) tujuan yang ingin dicapai, (2) karakteristik materi pembelajaran, (3) kemampuan pendidik, (4) waktu yang tersedia, dan (5) jumlah peserta (Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan, 2006: 11-12). Beberapa metodologi pembelajaran yang dapat digunakan oleh tutor dalam pendidikan Keaksaraan Fungsional antara lain adalah:

b. Participatory Rural Appraisal (PRA)

³⁸ Diknas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur sub Dinas pendidikan Luar Sekolah, *petunjuk pelaksanaan program pemberantasan Buta Aksara*. 4-5

Yaitu suatu metode dan sekaligus strategi pengkajian pedesaan secara partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan (Chambers; 1992; 5) metode ini merupakan sarana efektifitas untuk memberdayakan warga masyarakat melalui pengkajian terhadap masalah-masalah yang muncul di pedesaan contohnya : pertanian, perkebunan, kehutanan, pemupukan, banjir, penyakit menular, pencarian sumber-sumber mata air untuk pengairan.dll.

c. *Regenerated Freirian Literacy Throgh Empowering Community Techniques* (Reflect)

Reflect (pengembangan kembali teori keaksaraan Paulo freirian melalui teknik pemberdayaan masyarakat) yaitu suatu metode yang memperlihatkan adanya proses penyatuan antara kegiatan keaksaraan dan pemberdayaan masyarakat.

d. *Problem possing*

Problem possing atau juga disebut dengan pemunculan masalah merupakan metode untuk memunculkan masalah baik individu maupun kelompok yang kurang disadari oleh pelakunya. Metode ini merupakan salah satu metode yang bisa dikatakan paling efektif dalam proses pembelajaran program Keaksaraan Fungsional.

e. *Languange Experience Approach* (LEA)

Language Experience Approach (LEA) atau Pendekatan Pengalaman Berbahasa (PPB) merupakan metode inovasi dalam proses pembelajaran program Keaksaraan Fungsional yang dapat memotivasi masyarakat untuk membuat bahan belajar sendiri sesuai dengan materi yang ingin dipelajarinya.³⁹

f. *Structure Analytic Synthesis* (SAS)

Metode SAS merupakan metode yang menekankan bahwa belajar membaca dan menulis dapat bermanfaat serta menarik minat warga belajar, apabila menggunakan berbagai informasi yang dekat dari mereka. Ketertarikan itu akan bertambah lagi jika apa yang dipelajarinya memang diperlukan oleh masyarakat dan fungsional bagi kehidupannya.

g. *Key Words*

Key Words (kata kunci) merupakan metode yang menekankan pada penggunaan penyajian gambar-gambar yang melukiskan situasi kehidupan nyata dalam bentuk simbol atau gambar.

h. Suku Kata

Konsep utama metode ini adalah mempelajari suku kata yang berasal dari kata-kata tertentu yang sering dilafalkan dan memiliki makna yang jelas,

³⁹ Kusnadi M.pd dkk, *pendidikan keaksaraan filosofis, Strategi, Implementasi*, 152-162

dengan prinsip mengulangi, menghafal dan melatih tentang semua huruf baik konsonan maupun vocal yang membentuk suku kata tersebut.

i. Poster Abjad

Metode poster abjad yaitu metode yang hanya sekedar mempelajari abjad dari A-Z dengan menggunakan menggunakan benda-benda nyata yang ditempelkan sesuai huruf pertama dari nama benda tersebut. Warga belajar menyamakan huruf-huruf yang terdapat dalam benda tersebut dengan mencocokkannya pada poster abjad. kemudian mereka mengulangi, menghafal dan berlatih tentang semua huruf baik konsonan maupun vocal yang terdapat dalam poster tersebut.

j. Transliterasi

Transliterasi merupakan suatu metode yang mengalihkan atau menyamakan bunyi tulisan (huruf/aksara dan angka) dari satu bentuk (huruf/aksara dan angka) ke dalam bentuk (huruf/aksara dan angka) yang lain.⁴⁰

k. Structured Experiences

Atau biasa disebut juga dengan metode pendekatan laboratories, Yaitu suatu metode yang di dasarkan dari latihan-latihan dan permainan

⁴⁰ *pendidikan keaksaraan filosofis, Strategi, Implementasi*, ibid 164-171

permainan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman tertentu bagi peserta didik.⁴¹

l. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok dapat diartikan sebagai teknik penyajian bahan pelajaran dan sumber belajar, memberikan kesempatan kepada warga belajar dirangsang untuk berbincang-bincang ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat simpulan, atau menyusun alternatif pemikiran. Teknik ini akan tepat digunakan untuk mengembangkan pemikiran warga belajar dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam kegiatan belajar dengan teknik ini, warga belajar dirangsang untuk responsive terhadap lingkungan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah, mencari alternative pemecahan masalah, menetapkan prioritas penyelesaian setelah memepertimbangkan sumber yang tersedia dan kendala yang mungkin dihadapi, serta merencanakan, melaksanakan, dan menilai kegiatan penyelesaian masalah.

m. Metode Pendekatan Pengalaman Berbahasa (PPB)

Metode PPB merupakan cara pembelajaran keaksaraan (baca-tulis) berdasarkan pengalaman. Warga belajar membaca dan menulis melalui proses

⁴¹ Lunandi, *Pendidikan orang dewasa sebuah urain praktis untuk pembimbing lapangan, penataran, pelatihan dan penyuluhan lapangan*, (Jakarta : Gramedia Piustaka Utama, 1993), 41

membuat bahan belajar yang berasal dari ide atau kalimat yang diucapkan oleh warga belajar itu sendiri, bukan dari tutor.⁴²

n. Kunjungan lapangan dan Karyawisata

Kunjungan lapangan dan karya wisata adalah media yang penting dalam pendidikan orang dewasa. Keduanya adalah kunjungan yang terencana ke suatu tempat di luar kelas atau tempat pertemuan organisasi/perkumpulan.

o. Demonstrasi

Adalah salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa yang sangat sering digunakan dalam bidang pertanian maupun industri. Metode demonstrasi tidak seharusnya digunakan dalam setiap situasi. Demonstrasi dapat berhasil jika digunakan:

- a) Pada pengajaran manipulatif dan keterampilan
- b) Pada pengembangan pengertian
- c) Untuk menunjukkan bagaimana melakukan praktik-praktik baru
- d) Untuk memperkuat penerimaan sesuatu yang baru, dan memperbaiki cara melakukan sesuatu.

p. pelatihan

Pelatihan adalah salah satu metode dalam pendidikan orang dewasa atau dalam suatu pertemuan yang biasa digunakan dalam meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap peserta dengan cara spesifik. Pengetahuan

⁴² Didekomentasikan oleh <http://imadiklus.com>

tentang jenis pelatihan dan bagaimana merancang suatu pelatihan ini sangat penting, agar pelatihan dapat efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴³

2. Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran Pembeantasan Buta Akasara

Kurikulum pembelajaran Keaksaraan dalam program ini digali dari kekayaan bahasa ibu dengan mengoptimalkan tradisi lokal. Tradisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh peserta didik dan tutor secara bertingkat, sebagai sumber bahan ajar sesuai dengan kelas Keaksaraan peserta didik. Pembelajaran program ini menggunakan bahasa ibu karena dianggap memiliki kontribusi terhadap pemertahanan bahasa.

Bahan ajar yang digali dari kekayaan bahasa dan budaya, mendorong terangkatnya nilai-nilai budaya lokal yang mungkin sudah dilupakan atau tidak dikenal oleh responden. Penggunaan dongeng lokal, pribahasa, musik atau seni daerah lokal dalam proses pembelajaran Keaksaraan menjadikan program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberantasan buta aksara dan angka, tetapi berkontribusi pula pada pemertahanan bahasa dan budaya lokal.

Adapun sistem belajar mengajar yang dipakai pada program ini adalah sistem pembelajaran tematik dengan membahas trend-trend yang sedang marak didaerah tersebut bahkan pengelola ditiap kelompok belajar

⁴³ Dr. Ir. H. Supijanto, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 96-158

menggunakan alat masak agar proses belajar mengajar yang dilakukan dapat berjalan dengan tepat guna⁴⁴

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Buta Aksara

Beberapa faktor penyebab buta aksara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kemiskinan penduduk.

Sejak lama, kemiskinan, kebutaaksaraan, ketertinggalan dan keterbelakangan, serta ketidakberdayaan masyarakat, memang sudah ditahbiskan sebagai masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini sangat mempengaruhi usaha pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Banyak anak Indonesia yang terancam buta aksara, yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ekonomi keluarga.

b. Putus sekolah dasar(SD)

Ancaman besar lain yang selalu menghantui dan menjadi penyebab timbulnya calon-calon buta aksara adalah masih besarnya anak-anak SD/MI

⁴⁴ Wardatut Thoyyibah, *korelasi pelaksanaan program keaksaraan fungsional dengan motivasi belajar masyarakat tuna aksara pada materi pendidikan agama islam di desa karangmangu ngambon bojonegoro*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2011), t.d.27-28

yang putus sekolah, yang jumlahnya ssekitar 1 juta anak pertahun. Belum lagi anak-anak yang belum memiliki kesempatan masuk sekolah dikarenakan berbagai hal, misalnya karena orang tua dan keluarganya tidak mampu.

c. Drop out program PLS

Salah satu yang kurang diperhatikan penyebab terjadinya buta aksara di Indonesia adalah adalah DO program PLS yang selama ini dilaksanakan baik melalui program Paket A, yang dibiayai proyek OBAMA, UNICEF, PPLS, Pemda dan lainnya yang tidak diperhitungkan angka DO-nya, termasuk Paket A setara dengan SD dan Paket B setara SLTP.

d. Kondisi sosial masyarakat

1. Kesehatan dan gizi masyarakat.

Kondisi kesehatan dan gizi masyarakat yang kurang baik, jika tidak diperhatikan dengan seksama akan berpengaruh pada menurunnya angka partisipasi sekolah, terutama pada tingkat sekolah dasar.

2. Demografis dan geografis

Dilihat dari segi demografis dan geografis bagian terbesar dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan, sekitar 70-80% penduduk dunia terutama di Negara-negara miskin dan yang sedang berkembang termasuk Indonesia bermukim di pedesaan. Tenaga pendidik masih sangat kurang karena sebagian penduduk pedesaan berpendidikan rendah.

3. Aspek sosiologis.

Ditinjau dari segi sosiologis, sebagian besar masyarakat kita beranggapan bahwa harkat dan martabat seseorang akan meningkat apabila memiliki “ijazah” yang diperoleh melalui jalur pendidikan formal, dengan orientasi ingin menjadi pegawai negeri atau bekerja diperusahaan-perusahaan atau bekerja pada sektor-sektor formal.

4. Issue gender.

Jika ditinjau dari isu gender, berbagai pendapat menyatakan keberatan yang dinyatakan dengan terus terang maupun hanya sekedar menggerutu dibelakang. Pendapat ini tidak sekedar dikalangan aktivis pembangunan, tetapi juga dikalangan orang-orang yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat utamanya di bidang pendidikan. Isu yang berkembang tahun-tahun belakangan ini yaitu adanya pola hubungan pembagian peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, setara dan saling melengkapi.

e. Penyebab struktural

1. Skala makro.

Secara struktural pengambilan kebijakan diberbagai level dan bidang, termasuk bidang pendidikan didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan, sehingga keputusan yang dihasilkanpun adalah berdasarkan kacamata (kepentingan) laki-laki.

2. Skala Mikro

Dalam skala keluarga misalnya, hampir semua keputusan yang berkaitan dengan keuangan, akan didominasi oleh figure laki-laki (ayah), termasuk keputusan pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya.

f. Aspek kebijakan

Masalah klasik lainnya adalah program-program yang diluncurkan oleh pemerintah termasuk pendidikan, masih belum seluruhnya berpihak untuk kepentingan pengentasan bagi masyarakat yang memerlukannya. Banyak program-program pendidikan yang hanya bersifat “tawaran” dari atas yang belum tentu masyarakat membutuhkannya. Hal ini pun terjadi pada program pendidikan keaksaraan atau pemberantasan buta aksara, sehingga warga belajar yang menjadi sasaran didiknya tidak memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) untuk mensukseskannya, karena bukan berangkat dari apa yang dibutuhkan mereka (*bottom-up*).⁴⁵

4. Standar Kompetensi Pemberantasan Buta Aksara

Standar kompetensi pembelajaran pemberantasan buta aksara yaitu :

5. Membaca (*mampu membaca lancar dalam konteks kegiatan sehari-hari*)
6. Menulis (*dapat menulis satu teks sederhana tentang kegiatan sehari-hari, yang terdiri dari satu paragraph (20-25 kata)*)
7. Berhitung (*mampu menggunakan operasi bilangan (+, -, x, :) terkait dengan kegiatan sehari-hari*)

⁴⁵ Pendidikan keaksaraan filosofis, strategi dan implementasi, 36-47

Membaca	Menulis	Berhitung
- Membaca kalimat yang diucapkan peserta didik dan memilah-milahnya menjadi kata	- Menggunakan alat tulis dengan benar	- Mengenal konsep bilangan dan lambing bilangan 1 – 100
- Memilah kata menjadi suku kata	- Menuangkan ide dalam bentuk tulisan	- Mengenal dan memahami konsep bilangan (+, -, x, :)
- Memilah suku kata menjadi huruf	- Menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan sekaligus dengan tanda baca	- Mengenal dan memahami ukuran-ukuran standart
- Membaca satu “resep” masakan atau “ petunjuk “ cara pembuatan satu jenis ketrampilan	- Mengisi formulir atau blanko yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (KTP, KMS)	- Mengenal konsep waktu / jam
- Membaca teks sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar	- Menulis teks atau bacaan sederhana	- Memahami konsep nominal mata uang

D. Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional Untuk Memberantas Masyarakat Buta Aksara

Pencapaian maksimal dari program keaksaraan fungsional ini adalah masyarakat dapat memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung secara benar yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan hal-hal yang ada disekitarnya, seperti yang telah di jelaskan dalam keferensi UNESCO di Teheren-iran Tahun tujuan akhir dari keaksaraan adalah untuk mememberdayakan masyarakat yaitu untuk membantu pihak penerima (sasara didik) mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi 1965, tidak hanya itu program keaksaraan fungsional ini juga menjadikan seseorang dapat memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonomi dan kemampuan politiknya yang sangat diperlukan dalam upaya memperbaiki kedudukannya dimasyarakat, dengan kata lain proses pemberdayaan adalah setiap usaha pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran/pengertian dan kepekaan pada warga masyarakat terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan/atau politik sehingga pada akhirnya warga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. indikator keberhasilanya yaitu 80% peserta didik memperoleh SUKMA (surat keterangan melek aksara)..

Dari uraian diatas dapat kita lihat, betapa besarnya pengelolaan program Keaksaraan Fungsional untuk memberantas buta aksara di masyarakat yang masih dalam taraf buta aksara, maka dari itu program ini memiliki fungsi dan peranan yang amat penting bagi para masyarakat penyandang buta aksara husunya para

perempuan dalam membangun masyarakat modern. Karena tanpa adanya atau tanpa terselenggaranya program ini tidak mungkin dapat tercipta masyarakat yang lebih bermartabat dan memiliki kecakapan hidup sehingga tidak dipandang sebagai kaum yang lemah dan yang tidak berpendidikan, Karena program keaksaraan secara umum dirancang untuk memberantas ketunaaksraan penduduk dari buta aksara angka dan bahasa indonesia serta buta pendidikan dan pengetahuan dasar.

Melalui program pendidikan Non Formal melalui program Keaksaraan Fungsional ini masyarakat tidak hanya diajarkan untuk membaca, meneulis serta berhitung saja melainkan mereka juga dibekali dengan kemampuan yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, karena sasaran dari program ini adalah perempuan yang berusia 15-50 tahun keatas maka rata-rata mereka sudah menjadi ibu rumah tangga, jadi pembelajaran lain yang diajarkan dalam program tersebut seperti, belajar mengaji, membuat kue- kue dan masih banyak lagi yang lain yang itu semua pasti sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan para peserta didik sehingga masyarakat bisa dikatakan berdaya .

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat madani (civil society), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup

bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya (Tila'ar, 1997: 231).

Program keaksaraan ini sangat penting karena apabila masyarakat sadar dan mengerti akan manfaat yang ada dalam program tersebut maka mereka akan bersikap positif dan terhadap terselenggaranya program tersebut sehingga mereka dapat secara maksimal memiliki kemampuan yang sudah menjadi tujuan dari program keaksaraan fungsional tersebut di didalam kehidupannya.